



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 26 Agustus 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Membahas surat dari KPU terkait Permohonan Konsultasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pilkada, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Dana Kampanye Peserta Pilkada. 2. Membahas Permohonan Konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada ; 3. Membahas Permohonan Konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ; 4. Membahas permohonan Konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ; 5. Dan lain-lain.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI</b>

- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
- Hadir : A. 22 (dua puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI/8 (delapan) fraksi dari 9 (sembilan) fraksi  
B. Plh. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI,  
C. KPU RI  
D. Bawaslu RI  
E. DKPP RI

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plh. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda membahas surat dari KPU terkait permohonan konsultasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pilkada, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Dana Kampanye Peserta Pilkada, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan lain-lain, hari Senin, 26 Agustus 2024, dibuka pukul 10.41 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plh. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda membahas surat dari KPU terkait permohonan konsultasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pilkada, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Dana Kampanye Peserta Pilkada, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada, membahas permohonan konsultasi Rancangan

Per-Bawaslu tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan lain-lain, yaitu:

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU):

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
2. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (R-Perbawaslu):

1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

### **III. KESIMPULAN RAPAT**

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plh. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda membahas surat dari KPU terkait permohonan konsultasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pilkada, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Dana Kampanye Peserta Pilkada, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan lain-lain, yaitu:

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui:

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU):

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
2. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (R-Perbawaslu):

1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri dan DKPP RI.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.39 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2024

**KETUA RAPAT**



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**  
A-270